

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. A. Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Aristiono Nugroho dkk. 2018. *Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah Dan Legalisasi Aset Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang (Hasil Penelitian Sistematis 2018)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Bekerja sama dengan STPN Press
- Bagir Manan. 1997. *Fungsi Dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Bagir Mana Dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Bambang Sunggona. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Heru Nugroho. *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- M.S, Edison, Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2010. *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Muwahid. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Sarifuddin Azwar. 1998. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Tolib Setiady. 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas. Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun tentang Tanah Ulayat

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari

C. Skripsi

Nessya Atillah. Skripsi: *Konflik Tanah Ulayat Di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Nagari Aia Gadang dengan PT.Anam Koto)*

D. Jurnal

Dian Cahyaningrum. "Implementasi Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Perkebunan Untuk Membangun Kebun Bagi Masyarakat Sekitar." *Kajian* 18.1, (2016)

Iglesias Asik. "Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dalam Pola Kemitraaan Masyarakat di Kampung Besiq

Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat." *EJournal Ilmu Pemerintahan* (2017): 849-60

Kurnia Warman dan Syofiarti. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat VS Pemerintah)." *Masalah-Masalah Hukum* 41(3). (2010): 407-415

Munir Salim. "Adat Sebagai Wadah Perikat Untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3 (1). (2016): 109-118

Nur Asmah, Jengki Saputra. "Sengketa Antara PT. Anam Koto Dengan Masyarakat Nagari Aia Gadang" *Journal Review of Justisia* Vol (4). (2022)

Paulus, dkk. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi: Analisis Perbandingan. *JIH Aktualita* Vol. 1 (2024)

Roki Suriadi Pasaribu dan Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion*. (2022): 1-15

Shevy, Muhammad. "Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*. (2024): 31-43

Syofiarti, Titin Fatimah dan Pujha Ravhena. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Sebagai Ketahanan Pangan Nasional." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12 (2). (2024): 273-298

Titin Fatimah dan Hengki Andora. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4(1). (2014)

E. Internet

<https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/UFI3YnJZVXd6cWM> diakses pada hari selasa, tanggal 14 Januari 2025

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, *Penerapan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit Ditinjau Dari Hukum Perkebunan* (2024), diakses pada tanggal 24 Januari 2025

<https://pasamanbaratkab.go.id/> diakses pada tanggal 26 April 2025

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007
Putusan 17/Pdt.G/2018/PN.PSB